

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Instrumen Keuangan

Dalam PSAK 50 (revisi 2010) par. 07, instrumen keuangan didefinisikan sebagai setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Begitu pula IAS 32 (2009) par. 11 mendefinisikan *"a financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity"*. Sebelum mengadopsi IAS 39, istilah instrumen keuangan dalam PSAK 50 (1998) par. 06 disebut sebagai 'efek' yang memiliki definisi surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, dan unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Selain itu, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek termasuk dalam definisi instrumen keuangan atau dalam PSAK 50 (1998) disebut sebagai efek.

Dalam PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1998) instrumen keuangan lebih mengacu pada jenisnya, seperti surat pengakuan hutang, saham, obligasi dan sebagainya, sedangkan instrumen keuangan dalam PSAK 50 (revisi 2010) menekankan pada 'kontrak' sehingga memiliki cakupan yang lebih luas. Dimana PSAK 50 (revisi 2010) par. 09, 'kontrak' dan 'kontraktual' mengacu

pada suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang memiliki konsekuensi ekonomi yang jelas dan kecil peluangnya akan diabaikan oleh pihak-pihak yang terlibat, umumnya karena pemenuhan kesepakatan ini dapat dipaksakan secara hukum. Berdasarkan PSAK 50 (revisi 2010) instrumen keuangan dibedakan menjadi 6 jenis yaitu aset keuangan, liabilitas keuangan, instrumen ekuitas, instrumen derivatif, instrumen lindung nilai, dan instrumen yang mempunyai fitur opsi jual (*puttable instrument*).

Aset keuangan (*financial assets*) dalam PSAK 50 (2010) par. 07 didefinisikan sebagai setiap aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut, dan kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas baik yang bersifat derivatif maupun non-derivatif.

Liabilitas keuangan (*financial liabilities*) dalam PSAK 50 (2010) didefinisikan setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut dan kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas baik itu bersifat derivatif atau non-derivatif.

IFRS 7 (Wiley, 2011) mendefinisikan instrumen keuangan “*any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all its liabilities*”. Sedangkan PSAK 50 (2010) par. 07 mendefinisikan instrumen keuangan (equity instrument) adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen derivatif (derivative instrument) adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain yang memiliki 3 karakteristik yaitu nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditemukan, tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah kecil, dan diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Instrumen lindung nilai (hedging instruments) adalah derivatif yang ditetapkan untuk tujuan lindung nilai, atau aset keuangan non-derivatif atau liabilitas keuangan non-derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang nilai wajarnya atau arus kasnya diperkirakan dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai.

Dalam PSAK 50 (2010) par.07 instrumen yang mempunyai fitur opsi jual (*puttable instrument*) didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrument kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan atau kematian atau purnakarya dari pemegang instrument. Sedangkan IFRS 7 : Financial Instrument mendefinisikan *puttable*

instrument “*a financial instrument that give the holder the right to put the instrument back to the issuer for cash or another financial asset. It can also be automatically put back to the issuer on the occurrence of an uncertain future event or the death or retirement of the instrument holder*”. *Puttable instrument* mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen tersebut dan menerima kas atau aset keuangan lain pada saat melakukan eksekusi opsi jual tersebut.

2.1.2 Manajemen Laba

Alasan mendasar mengapa manajer melakukan praktik manajemen laba, salah satunya yaitu laba yang diterima oleh perusahaan selalu mengalami kenaikan dari periode ke periode secara konsisten (Sulistyanto, 2008). Ficher dan Rosenzweig (1995) dalam Sulistyanto (2008) mendefinisikan manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang.

Manajemen laba dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya adalah berbasis akrual. Manajemen laba berbasis akrual merupakan manajemen laba yang dilakukan dengan memanfaatkan alternatif pada komponen akrual dalam laporan keuangan. Menurut Sulistyanto (2008) akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan. Alasannya, komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan

bukti kas secara fisik sehingga upaya mempermainkan komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan.

Terdapat beberapa metode empiris yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi manajemen laba, antara lain model yang berbasis *specific accruals* yang dikembangkan oleh McNichols dan Wilson, Petroni, Beaver dan Engel, Beneish, serta Beaver dan McNichols. Model *specific accruals* atau akrual khusus merupakan pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari entitas tertentu pula.

2.1.3 Kualitas Laba

Kualitas laba menurut Grahita (2001) dalam Sugiarto dan Jang (2007), laba akuntansi yang berkualitas adalah laba akuntansi yang dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sebenarnya dengan sedikit atau tidak dipengaruhi oleh manajemen laba yang disebabkan dari penerapan konsep akrual dalam akuntansi (*perceived noise*). Semakin tingginya tingkat *perceived noise* yang terdapat dalam laba akuntansi, maka kualitas laba akuntansi tersebut akan semakin rendah pula (Leisa Jang, 2007). Suatu laba dikatakan berkualitas apabila laba telah memenuhi karakteristik kualitatif kerangka konseptual FASB yang terdiri dari relevansi, dapat dipahami, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, dapat dibandingkan, dan lengkap. Selain itu Bath et al.(2006) menunjukkan bahwa laporan laba yang berkualitas ialah laba yang berkualitas menunjukkan rendahnya manajemen laba, pengakuan kerugian yang tepat

waktu, dan hubungan antara nilai laba dan *equity book value* tinggi. Sehingga laba yang berkualitas dapat digunakan oleh publik dan investor untuk menilai perusahaan.

Dalam Saputra (2013), penelitian yang dilakukan Abdelghany (2005), kualitas laba diproksikan dengan manajemen laba dengan membagi pengukuran kualitas laba ke dalam 3 pendekatan mendasar. Pendekatan pertama adalah memfokuskan pada variabilitas laba yang berdasarkan pemikiran bahwa manajer cenderung meratakan laba (*smoothness*). Abdelghany et al (2005) percaya bahwa investor akan lebih memilih laba yang meningkat secara halus. Leuz et al (2003) mengukur variabilitas laba dengan menghitung rasio deviasi standar laba usaha (operasi) terhadap standar arus kas dari aktivitas operasi. Nilai rasio yang semakin rendah menunjukkan *income smoothing* yang semakin tinggi.

Pendekatan yang kedua berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Barton dan Simko (2002) dalam Saputra (2013), dimana kualitas laba memfokuskan pada gagasan *earning surprise* yang digerakkan oleh saldo awal aset operasi rata-rata terhadap penjualan. Penelitian Barton dan Simko (2002) memberikan bukti empiris bahwa perusahaan dengan saldo awal aset operasi rata-rata yang besar terhadap penjualan cenderung melaporkan *earning surprise* yang telah ditentukan. Pendekatan ketiga menekankan pada rasio kas dari operasi terhadap laba. Pengukuran ini guna mengukur kualitas laba berdasarkan gagasan bahwa semakin dekat hubungan laba terhadap kas berarti kualitas laba yang semakin

tinggi. Pendekatan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Penman (2001) dan merupakan teknik paling mudah untuk mengukur kualitas laba.

Dalam Saputra (2013), penelitian yang dilakukan oleh Francis dkk. (2004) yang mengidentifikasi 7 cara mengukur kualitas laba (atribut laba). Tujuh karakteristik kualitas laba ini merupakan atribut dari ”*accounting-based*” atau ”*market-based*”, tergantung pada asumsi pokok mengenai fungsi laporan keuangan. Atribut laba berbasis akuntansi antara lain kualitas akrual (*accrual quality*), *persistence*, daya prediksi (*predictability*), dan perataan (*smoothness*). Sedangkan laba berbasis pasar beratributkan relevansi nilai (*value relevance*), ketepatan waktu (*timeliness*), dan konservatisme (*conservatism*). Berikut merupakan 10 atribut yang menjadi indikator dalam menentukan kualitas laba:

a. Kualitas akrual (*accrual quality*)

Kualitas akrual merupakan pengukuran kualitas laba berdasarkan pandangan bawah laba yang mendekati arus kas memiliki kualitas laba yang lebih baik. Dechow and Dichev (2002) mengukur kualitas laba dengan mengambil pemetaan akrual modal kerja pada periode masa lalu, periode sekarang, dan arus kas dari aktivitas operasi periode selanjutnya.

b. *Persistence*

Persistence merupakan pengukuran kualitas laba yang ditandai dengan pandangan bahwa laba yang berkelanjutan adalah laba yang lebih baik.

c. Daya Prediksi (*predictability*)

Daya prediksi diartikan sebagai kemampuan laba untuk memprediksi. Pengukuran kualitas laba ini berdasarkan pandangan bahwa jumlah laba yang cenderung sama tiap tahunnya merupakan kualitas laba yang tinggi.

d. Perataan (*smoothness*)

Perataan laba indentik diukur dengan laba rata-rata terhadap arus kas. Pengukuran ini menggunakan arus kas sebagai konstruksi referensi untuk laba yang tidak diratakan (*unsmoothed earnings*), sebab diasumsikan bahwa arus kas tidak dapat dikelola seperti laba. Sebagai salah satu indikator kualitas laba, perataan menggerakkan pemikiran bahwa manajer menggunakan informasi pribadi mengenai laba masa yang akan datang guna meratakan fluktuasi sementara dan dengan demikian mencapai jumlah laba yang dilaporkan sesuai yang telah ditentukan. Sehingga indikasi laba semakin rata tiap tahunnya menunjukkan kualitas laba yang baik.

e. Relevansi Nilai (*Value Relevance*)

Relevansi nilai merupakan kemampuan satu atau lebih jumlah akuntansi yang menjelaskan variasi dalam retur saham. Semakin besar tingkat variasi dalam retur, maka kualitas laba semakin baik.

f. Variabilitas Laba (*earning variability*)

Variabilitas laba biasanya diukur dengan deviasi standar dari laba, yang secara statistik dan konseptual berhubungan terhadap perataan dan kualitas akrual.

g. *Earning informativeness* atau *Earning Response Coefficient* (ERC)

Earning informativeness diukur dari koefisien *slope* yang diestimasi pada tingkat atau perubahan pada laba, atau beberapa agregat dari koefisien *slope* yang diestimasi pada kedua tingkat atau perubahan laba. Koefisien respon laba didefinisikan sebagai ukuran tingkat *abnormal return* sekuritas dalam merespon komponen *unexpected earning* yang dilaporkan perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut. Semakin tinggi ERC, semakin tinggi kualitas laba.

h. *Earning Opacity*

Didefinisikan sejauh mana distribusi laba yang dilaporkan gagal untuk secara akurat mencerminkan distribusi sebenarnya pada laba ekonomi yang tidak dapat diobservasi (Bhattacharya et al, 2003).

i. *Timeliness*

Ketepatan waktu sama dengan relevansi nilai, dimana konstruksi referensi untuk pengukuran ini adalah retur saham dan mengukurnya berdasarkan kekuatan penjelasan (*explanatory power*). Ketepatan waktu menggambarkan kemampuan laba untuk menggerakkan berita baik dan berita buruk relasi dengan retur saham.

j. *Conservatism*

Merupakan kemampuan mengubah laba akuntansi untuk menggerakkan kerugian ekonomi yang diukur dengan retur saham versus laba ekonomi yang diukur dengan retur saham positif (Ball et al, 2000). Berdasarkan pada pengukuran yang dilakukan oleh Basu (1997), Ball et al

(2000) mengukur konservatisme sebagai rasio koefisien *slope* pada retur negative terhadap koefisien *slope* pada retur positif dalam *reverse regression if earning* pada retur.

2.1.4 Pengukuran Kualitas Laba

Terdapat beberapa model empiris yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas laba, antara lain model yang dikembangkan oleh Penman (2001), Leuz dkk (2003), serta Beaver dan Engel (1996) (Saputra, 2013). Model Penman (2001) menekankan kualitas laba pada korelasi antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Semakin tinggi korelasi antara laba dan arus kas, maka kualitas laba semakin baik. Model Leuz dkk (2003) menekankan kualitas laba pada tingkat variabilitas laba. Model yang dikembangkan oleh Leuz dkk (2003) menghitung rasio standar deviasi dari laba operasi terhadap standar deviasi arus kas dari aktivitas operasi. Semakin kecil nilai rasio (nilai *income smoothing* meningkat), maka kualitas laba semakin rendah. Kemudian model empiris yang dikembangkan oleh Beaver dan Engel (1996), dimana kualitas laba diproksikan dengan manajemen laba (Rahmawati, 2007). Semakin tinggi nilai *discretionary accruals* (DA) maka mengindikasikan kualitas laba menurun, dengan kata lain semakin tinggi praktik manajemen laba maka kualitas laba akan menurun.

Menurut Saputra (2013) model empiris yang dikembangkan oleh Beaver dan Engel (1996) merupakan model empiris yang lebih tepat untuk mengukur kualitas laba pada perusahaan perbankan. Sedangkan model empiris yang dikembangkan oleh Penman (2001) dan Leuz dkk (2003) merupakan model pengukuran kualitas laba secara umum yang dapat digunakan pada perusahaan

manufaktur, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Beaver dan Engel (1996).

Tabel 2.1

Model Pengukuran Kualitas Laba

No.	Peneliti	Proksi	Model Empiris	Keterangan
1.	Beaver dan Engel (1996)	Manajemen laba	$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it}$	Semakin tinggi nilai DA, maka kualitas laba semakin rendah.
2.	Penman (2001)	<i>Income Smoothing</i>	$= \frac{\text{Operating Cash Flow}}{\text{Net Income}}$	Semakin tinggi nilai rasio, maka kualitas laba semakin tinggi.
3.	Leuz dkk. (2003)	Variabilitas Laba	$= \frac{\sigma(\text{Operating Income})}{\sigma(\text{Operating Cash Flow})}$	Semakin tinggi nilai rasio, maka kualitas laba semakin tinggi

2.1.5 Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Tentang Instrumen Keuangan Di Indonesia

Sebelum mengadopsi *International Accounting Standards* (IAS) 32 dan 39 (2009), PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999) mengacu pada SFAS 115 tentang *Accounting for Certain Investment in Debt and Equity Securities* dan SFAS 133 tentang *Accounting for Derivative Instrument and Hedging Activities*. PSAK 50 (1998) tentang Akuntansi Infestasi Efek Tertentu dan PSAK 55 (1999) tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai mulai berlaku efektif 1 Januari 1999. Hal ini berkaitan dengan peraturan tentang pengukuran dan sistematika penyajian instrumen keuangan berdasarkan nilai wajar yang dikeluarkan oleh *Financial Accounting Standards Board*

(FASB). Pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan selain berpedoman pada PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999) juga berpedoman pada PSAK 10 (1995), PSAK 28 (1996), PSAK 31 (2000), PSAK 36 (1996), PSAK 42 (1998), dan PSAK 43 (1997).

Bulan September dan Desember tahun 2006, IAI menerbitkan PSAK 50 (revisi 2006) tentang penyajian dan pengungkapan dan PSAK 55 (revisi 2006) tentang pengakuan dan pengukuran sehubungan dengan diterbitkannya IAS 32 (2005) : *Financial Instrument: Disclosure and Presentation* dan IAS 39 (2005) : *Financial Instrument: Recognition and Measurement*. Sebagai bentuk tanggapan atas perubahan peraturan tentang instrumen keuangan akibat konvergensi ke IAS 32 (2005) dan IAS 39 (2005) menjadi PSAK 50 (2006) dan PSAK 55 (2006), Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No. 11/4/DPNP perihal pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan Indonesia yang mewajibkan semua perusahaan perbankan di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) tentang instrumen keuangan (Boediono, 2008).

Pada awalnya PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) efektif berlaku per 1 Januari 2008, namun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/4/DPNP perihal pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan Indonesia yang diterbitkan pada 27 Januari 2009, disebutkan bahwa penggunaan PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) efektif berlaku pada 1 Januari 2010. Perihal instrumen keuangan yang mengatur tentang pengakuan dan

pengukuran, pada bulan Oktober 2011 IAI menerbitkan PSAK 55 (revisi 2011) untuk menggantikan PSAK 55 (revisi 2006) yang sudah ada, sebagai bagian dari tahap penyempurnaan adopsi IAS 39 (2009) dan berlaku efektif pelaksanaan pada 1 Januari 2012. Perbedaan antara PSAK 55 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2011) adalah peraturan mengenai reklasifikasi dari kelompok investasi ‘diukur pada nilai wajar melalui labar rugi’ ke kelompok ‘pinjaman yang diberikan dan piutang’ dan reklasifikasi dari ‘tersedia untuk dijual’ ke kelompok ‘pinjaman yang diberikan dan piutang’. Dengan kata lain PSAK 55 (revisi 2011) hanya sebagai bentuk upaya penyempurnaan IAS 39 yang sebenarnya sudah ada pada PSAK 55 (revisi 2006).

Berikut ini merupakan gambaran tentang perkembangan PSAK dari tahun ke tahun.

Tabel 2.2

Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Instrumen Keuangan

Periode Tahun	Periode I 1994-1998	Periode II 1998-2010	Periode III 2010-2012	Periode IV 2012- Sekarang
PSAK (adopsi) yang mengatur instrumen keuangan	Instrumen keuangan diatur dalam PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan.	Instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (1999) yang merupakan adopsi dari SFAS 115 (1993) dan SFAS 133 (1998)	Instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 (2006) dan PSAK 55 (2006) yang merupakan adopsi dari IAS 32 (2005) dan IAS 39 (2005)	Instrumen keuangan diatur dalam PSAK 50 (2012), PSAK 55 (2012), dan PSAK 60 yang merupakan hasil adopsi dari IAS 32, IFRS 9, dan IFRS 7

Periode Tahun	Periode I 1994-1998	Periode II 1998-2010	Periode III 2010-2012	Periode IV 2012- Sekarang
	-	Adanya penyempurnaan dari peraturan yang sebelumnya mengenai instrumen keuangan dengan diterbitkannya PAPI 2001	Adanya penyempurnaan lebih detail dari peraturan yang sebelumnya mengenai instrument keuangan dengan diterbitkannya PAPI 2008	Adanya penyempurnaan lebih detail dari peraturan yang sebelumnya mengenai instrument keuangan dengan diterbitkannya PAPI 2008

Sumber: Ikatan Akuntansi Indonesia

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Perbedaan Antara Sebelum dan Sesudah Adopsi *International Accounting Standards (IAS) 39*

Adopsi *International Accounting Standards (IAS) 39* tentang *Financial Instrument : Recognition and Measurement* menjadi PSAK 55 (2011) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran berdampak pada reklasifikasi, derivatif melekat, dan penentuan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atau *loan loss provision*. Mengadopsi standar akuntansi keuangan internasional dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas laba dalam laporan keuangan (Daniel dkk, 2012). Terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah adopsi standar akuntansi internasional yang berpengaruh pada kualitas laba.

Sebelum mengadopsi IAS 39, PSAK 50 (1998) tentang Akuntansi Investasi Efek Tertentu dalam reklasifikasi hanya mengatur laba (rugi) yang belum

direalisasi atas perubahan kelompok investasi (par.16). PSAK 50 (1998) masih menyediakan banyak alternatif kepada manajer dalam mengakui laba (rugi) yang belum direalisasi pada saat reklasifikasi akibat perbuahan dari nilai buku ke nilai wajar atau sebaliknya. Semakin banyak pilihan alternatif dalam pengakuan laba (rugi) inilah yang menjadi penyebab menurunnya kualitas laba. Selain itu, ini menjadi celah bagi manajer untuk melakukan manajemen laba.

PSAK 50 (1998) masih memperbolehkan manajer untuk melakukan reklasifikasi dari kelompok ‘diperdagangkan’ (TS) ke ‘tersedia untuk dijual’ (AFS) atau sebaliknya dan mengakui laba (rugi) yang belum direalisasi saat reklasifikasi dalam laba bersih.

Sebagai contoh, pada tahun 2004 manajemen PT ANDA mengklasifikasikan sekuritas milik PT RENA sebagai investasi dalam kelompok ‘diperdagangkan’ dengan nilai perolehan Rp15.000 dan harga pasar Rp18.000. Pada 1 Maret 2005, manajemen memutuskan untuk melakukan reklasifikasi terhadap sekuritas milik PT RENA sebagai kelompok ‘tersedia untuk dijual’ (AFS) dengan harga pasar Rp19.000. Maka ayat jurnal untuk mencatat reklasifikasi dari ‘diperdagangkan’ (TS) ke ‘tersedia untuk dijual’ (AFS) sebagai berikut:

Investasi PT RENA (AFS)	Rp19.000
Investasi PT RENA (TS).....	Rp15.000
Penyesuaian Nilai Investasi (TS)	3.000
Laba Belum Direalisasi Perubahan Investasi	1.000

Begitu pula sebaliknya saat reklasifikasi dari kelompok ‘tersedia untuk dijual’ (AFS) ke ‘diperdagangkan’ (TS) maka laba (rugi) yang belum direalisasi pada saat reklasifikasi diakui dalam laba bersih. Sebagai contoh tahun 2004, manajemen PT ANDA mengklasifikasikan sekuritas milik PT DUTA sebagai investasi dalam kelompok AFS dengan nilai perolehan Rp60.000 dan harga pasar Rp53.500. Pada 1 April 2005, manajemen memutuskan untuk melakukan reklasifikasi terhadap sekuritas milik PT DUTA sebagai kelompok TS dengan harga pasar Rp51.500. Maka ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat reklasifikasi dari ‘tersedia untuk dijual’ (AFS) ke ‘diperdagangkan’ (TS) sebagai berikut:

Investasi PT DUTA (TS)	Rp51.500
Penyesuaian Nilai Investasi AFS.....	6.500
Rugi Belum Direalisasi Perubahan Investasi.....	8.500
Investasi PT DUTA (AFS).....	Rp60.000
Penurunan Nilai (AFS).....	6.500

Selain itu saat terjadinya reklasifikasi kelompok investasi ‘dimiliki hingga jatuh tempo’ (HTM) ke ‘tersedia untuk dijual’ (AFS), PSAK 50 (1998) mengakui laba (rugi) belum direalisasi sebagai bagian dari ekuitas. Sehingga tidak berpengaruh pada laporan laba rugi. Sebagai contoh, pada tahun 2004 manajemen PT ASIK mengklasifikasikan sekuritas milik PT ANA sebagai kelompok investasi HTM dengan nilai perolehan Rp100.000 dan harga pasar

Rp103.500. Kemudian pada 1 Mei 2005, manajemen memutuskan untuk melakukan reklasifikasi terhadap sekuritas milik PT ANA sebagai kelompok AFS dengan harga pasar Rp102.000. Maka, ayat jurnal untuk mencatat reklasifikasi dari ‘dimiliki hingga jatuh tempo’ (HTM) ke ‘tersedia untuk dijual’ (AFS) sebagai berikut:

Investasi PT ANA (AFS).....	Rp102.000
Investasi PT ANA (HTM).....	Rp100.000
Penurunan Nilai Efek (AFS).....	Rp2.000

Namun berbeda halnya saat terjadi reklasifikasi dari kelompok investasi ‘tersedia untuk dijual’ (AFS) ke kelompok ‘dimiliki sampai jatuh tempo’ (HTM). Pada saat tanggal reklasifikasi laba (rugi) yang belum direalisasi yang sebelumnya telah diakui sebagai ekuitas harus diamortisasi secara periodik dalam sisa masa manfaat sekuritas berdasarkan metode yang sama dengan metode amortisasi premi (diskonto) yang digunakan. Sebagai contoh, pada tahun 2004, manajemen PT AGUNG mengklasifikasikan sekuritas milik PT MIRNO sebagai kelompok investasi AFS dengan nilai perolehan Rp25.000 dan harga pasar Rp32.500. Pada 1 Maret 2005, manajemen memutuskan untuk melakukan reklasifikasi terhadap sekuritas milik PT MIRNO sebagai kelompok investasi HTM dengan harga Rp29.500. Maka ayat jurnal untuk mencatat reklasifikasi dari ‘tersedia untuk dijual’ (AFS) ke ‘dimiliki hingga jatuh tempo’ (HTM) sebagai berikut:

Investasi PT MIRNO (HTM).....	Rp29.500
Kenaikan (Penurunan) nilai Investasi AFS.....	3.000
Investasi PT MIRNO (AFS).....	Rp25.000
Penyesuaian Nilai (AFS).....	7.500

Sedangkan pada PSAK 55 (2011) tentang Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran yang merupakan hasil adopsi dari IAS 39, mengatur reklasifikasi lebih ketat. Sehingga dapat mengurangi celah bagi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba. Setelah mengadopsi IAS 39, PSAK 50 (2011) tidak memperkenankan lagi entitas untuk melakukan reklasifikasi instrumen keuangan dari kelompok ‘diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi’ (FVTPL) ke kelompok ‘tersedia untuk dijual’ (AFS) atau sebaliknya, kelompok FVTPL ke kelompok investasi ‘dimiliki hingga jatuh tempo’ (HTM) atau sebaliknya. Namun PSAK 55 (2011) memperkenalkan entitas untuk melakukan reklasifikasi dari kelompok FVTPL ke kelompok ‘pinjaman yang diberikan dan piutang’ (L&R) dan dari kelompok investasi AFS ke kelompok L&R (par.55 dan 56). Pada saat reklasifikasi dari kelompok FVTPL ke kelompok L&R, laba (rugi) yang muncul diakui dalam laporan laba rugi. Sedangkan saat reklasifikasi dari kelompok AFS ke kelompok L&R, laba (rugi) yang muncul diakui sebagai ekuitas.

Selain itu dalam reklasifikasi, PSAK 55 (2011) memperkenalkan adanya *tainting rule* (par.08). *Tainting rule* memperbolehkan entitas untuk melakukan reklasifikasi dari HTM ke AFS jika : (a) mendekati jatuh tempo atau tanggal

pembelian kembali, (b) setelah entitas telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau entitas telah memperoleh pelunasan dipercepat, (c) terkait dengan kejadian diluar kendali entitas. Penerapan atas *tainting rule*, tidak memperbolehkan entitas untuk mengkasifikasikan aset keuangan sebagai HTM, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi kelompok HTM ke AFS dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo.

Adopsi IAS 39 menjadi PSAK 55 (2011) juga berdampak pada pengakuan dan pengukuran derivatif melekat atau instrumen majemuk. Secara substansi tidak terdapat perbedaan antara PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (2011) dalam pengakuan *opsi* konversi yang melekat. Namun perbedaan antara PSAK 50 (1998) dan PSAK 55 (2011) terletak pada penyajian instrumen majemuk yang kemudian diatur lebih rinci pada PSAK 50 (2010) par.31. Pada saat menerbitkan instrumen majemuk, PSAK 50 (1998) memberikan alternatif kepada entitas untuk mengakui *opsi* konversi sebagai kelompok liabilitas saja atau dipisahkan antara ekuitas dan liabilitas.

Sedangkan PSAK 55 (2011) PA 42 mengharuskan entitas untuk memisahkan *opsi* konversi sebagai kelompok ekuitas dan liabilitas. Perbedaan antara diakui sebagai liabilitas saja dan dipisahkan sebagai kelompok ekuitas dan liabilitas akan berpengaruh pada perbedaan pencatatan nilai buku instrumen majemuk. Hal ini disebabkan adanya perbedaan beban bunga antara kedua metode tersebut.

Saat mengakui *opsi* konversi sebagai liabilitas saja akan memiliki beban bunga yang lebih kecil dibandingkan memisahkan *opsi* konversi menjadi kelompok ekuitas dan liabilitas. Karena premi (diskon) yang bersifat mengurangi (menambah) beban pada saat mengakui sebagai kelompok liabilitas saja lebih besar (kecil) dari pada memisahkan *opsi* konversi menjadi ekuitas dan liabilitas. Perbedaan pengakuan *opsi* konversi pada saat penerbitan akan berakibat pada perbedaan beban yang nantinya akan diakui dalam laporan laba rugi, sehingga dapat mengurangi kualitas laba.

Untuk meningkatkan kualitas laba, PSAK 55 (2011) mewajibkan entitas untuk mengakui *opsi* konversi secara terpisah antara kelompok entitas dan liabilitas (PA 42). Sebagai contoh, 1 Januari 2004 PT GRIYA menerbitkan obligasi konversi nilai nominal Rp1000, 10%, 10 tahun, sebanyak 100 lembar, dan menjual pada saat kurs 105. Pada saat yang sama diestimasi bahwa obligasi tanpa hak konversi tersebut hanya akan laku dijual pada kurs 103. Maka ayat jurnal yang diperlukan sebagai berikut:

- a. Diperlakukan sebagai liabilitas saja

Kas.....Rp105.000

Obligasi Konversi.....Rp100.000

Premi Obligasi Konversi.... 5.000

- b. Dipisahkan sebagai ekuitas dan liabilitas

Kas.....	Rp105.000
Obligasi Konversi.....	Rp100.000
Premi Obligasi Konversi.....	3.000
Modal Disetor-Hak Atas Saham.....	2.000

Pada saat perhitungan beban bunga diasumsikan entitas menggunakan metode garis lurus sebagai dasar amortisasi premi obligasi konversinya

- a. Dipperlakukan sebagai liabilitas saja

$$[(0,1 \times \text{Rp}100.000) - (1/10 \times \text{Rp}5000)] = \text{Rp}9.500$$

Beban Bunga..... Rp9.500

Premi Obligasi Konversi..... 500

Kas..... Rp10.000

- b. Dipisahkan antara liabilitas dan ekuitas

$$[(0,1 \times \text{Rp}100.000) - (1/10 \times \text{Rp}3000)] = \text{Rp}9.700$$

Beban bunga.....Rp9.700

Premi Obligasi Konversi..... 300

Kas.....Rp10.000

Kemudian pada saat instrumen majemuk dikonversi menjadi saham biasa, PSAK 50 (1998) memberikan pilihan kepada entitas untuk mengukur saham biasa dengan dua metode yang berbeda, yaitu metode nilai buku dan metode nilai pasar. Metode nilai pasar memperlakukan *opsi* saat dikonversi sebagai transaksi

pelunasan hutang obligasi sebelum jatuh tempo, sehingga entitas harus mengakui laba (rugi) yang terjadi dalam laporan laba rugi. Sedangkan metode nilai buku memperlakukan *opsi* saat dikonversi sebagai transaksi modal, sehingga entitas tidak perlu mengakui adanya laba (rugi) dalam laporan laba rugi.

Sebagai contoh, pada tanggal 1 Januari 2004 PT BUDI menjual obligasi konversi Rp100.000, 8%, seharga Rp106.000. Setiap obligasi senilai Rp1000 dapat ditukarkan menjadi 10 lembar saham biasa PT BUDI dengan nilai par Rp10. Diasumsikan bahwa obligasi dikonversi pada saat tanggal pembayaran bunga. Pada 1 Januari 2006, harga saham PT BUDI adalah Rp110 per saham dan premi sebesar Rp3.000 masih belum diamortisasi. Maka ayat jurnal yang dibutuhkan pada saat dikonversi sebagai berikut:

a. Metode nilai buku

Obligasi Konversi.....	Rp100.000
Premi Obligasi Konversi.....	3000
Saham Biasa.....	Rp10.000
Agio Saham Biasa.....	93.000

b. Metode nilai pasar

Obligasi Konversi.....	Rp100.000
Premi Obligasi Konversi.....	3000
Beban Kerugian.....	7000
Saham Biasa.....	Rp10.000
Agio Saham Biasa.....	100.000

Setelah mengadopsi IAS 39, pada saat *opsi* dikonversi menjadi saham biasa PSAK 55 (2011) PA 43 (g) hanya memperbolehkan manajer mengukur saham biasa menggunakan metode nilai buku saja. Sehingga pembatasan dalam memilih metode pengukuran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan.

Dalam instrumen majemuk atau campuran PSAK 55 (2011) par.10 juga mengatur tentang pengakuan *opsi* yang dikonversi karena dipengaruhi oleh insentif. PSAK 55 (2011) par. 10 mengakui insentif sebagai beban kerugian dalam laporan laba rugi yang kemudian diatur lebih rinci dalam PSAK 50 (2010) tentang penyajian instrumen keuangan (par.32-33). Sebagai contoh, tahun 2010 PT RITA menerbitkan 500 lembar obligasi konversi, 6%, dengan nilai nominal @Rp1000. Setiap obligasi dapat ditukarkan dengan 10 lembar saham biasa dengan nilai par Rp20. Tahun 2011 PT RITA menawarkan 2 lembar saham biasa tambahan (insentif) atas setiap obligasi. Diasumsikan harga saham biasa pada tanggal penawaran adalah @110. Maka ayat jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat konversi dengan insentif sebagai berikut :

Hutang Obligasi.....	Rp500.000
Beban Kerugian Konversi.....	110.000 ^a
Saham Biasa.....	Rp120.000 ^b
Agio Saham Biasa.....	490.000

^{a)} Saham tambahan per obligasi [(12-10) x 500 x Rp110]

^{b)} Saham biasa (12 x 500 x Rp20)

Pengakuan insentif dalam bentuk saham biasa tambahan sebagai beban kerugian konversi akan pengaruh pada penurunan laba. Sebelum mengadopsi IAS 39 peraturan tentang pengakuan atas insentif pada instrument majemuk atau campuran belum ada. Dengan demikian, adopsi standar akuntansi internasional memberikan peraturan yang jelas dalam pengakuan insentif pada instrumen majemuk. Sehingga dengan mengadopsi standar akuntansi internasional dapat meningkatkan kualitas laba suatu entitas.

Perbedaan yang muncul akibat adopsi IAS 39 selanjutnya ialah dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), PSAK 50 (1998) tidak mengatur pemulihan pada penurunan nilai (*impairment*) sehingga kenaikan atau penurunan atas nilai wajar dicatat sebagai komponen ekuitas. Sebelum mengadopsi IAS 39, CKPN dibentuk berdasarkan ekspektasi kerugian kredit (*expectation loss*) (par.18). Sehingga entitas dapat menumpuk cadangan yang berasal dari laba dengan alasan kehati-hatian. Penumpukan CKPN dilakukan ketika entitas merasa kemungkinan kreditnya tidak tertagih lebih besar. Kebijakan inilah yang kemudian digunakan oleh manajemen sebagai celah untuk melakukan manajemen laba.

Untuk meningkatkan kualitas laba, PSAK 55 (2011) mewajibkan entitas untuk melakukan pemulihan atas penurunan nilai yang terjadi sebelumnya. Pemulihan ini berlaku ketika pada periode berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui harus dipulihkan kembali dan jumlah pemulihan tersebut diakui pada laporan

laba rugi (par.72). Selain itu PSAK 55 (2011) mewajibkan entitas untuk menunjukkan bukti objektif pada saat pembentukan CKPN (par. 65), antara lain:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam.
- b. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya tunggakan pembayaran pokok atau bunga.
- c. Restrukturisasi atau keringanan akibat pihak peminjam mengalami kesulitan.
- d. Peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- f. Kemungkinan besar bangkrut.

Dengan adanya batasan inilah diharapkan dapat mengurangi praktik manajemen laba dan dapat meningkatkan kualitas laba.

Tabel 2.3
Perbandingan Sebelum dan Sesudah Adopsi IAS 39

No.	Kategori	Sebelum Mengadopsi IAS 39 (PSAK 55 (1999) yang Berlaku Efektif 1 Januari 2009)	Setelah Mengadopsi IAS 39		Pengaruh Ke Kualitas Laba
			PSAK 55 (2006) yang Berlaku Efektif 1 Januari 2011 (Adopsi IAS 39 (2005))	PSAK 55 (revisi 2011) yang Berlaku Efektif 1 Juni 2012 (Adopsi IAS 39 (2009))	
1.	Reklasifikasi	<p>Hanya mengatur laba (rugi) yang belum direalisasi dari perubahan kelompok investasi (PSAK no. 50 (1998) par.16)</p> <p>Reklasifikasi dari kelompok 'diperdagangkan' (TS) ke 'tersedia untuk dijual' (AFS) atau sebaliknya, mengakui laba (rugi) yang belum direalisasi pada tanggal reklasifikasi dalam laba bersih.</p> <p>Reklasifikasi dari kelompok 'dimiliki hingga jatuh tempo' (HTM) ke 'tersedia untuk dijual' (AFS) mengakui laba (rugi) belum direalisasi pada saat reklasifikasi sebagai bagian ekuitas. Sehingga tidak berpengaruh pada laporan laba rugi.</p>	<p>a. Entitas sudah tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi instrumen keuangan dari (par.51-55):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok 'diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi' (FVTPL) ke kelompok 'tersedia untuk dijual' (AFS) atau sebaliknya. 2. Kelompok FVTPL ke kelompok 'dimiliki hingga jatuh tempo' (HTM) atau sebaliknya. 3. Kelompok 'pinjaman yang diberikan dan piutang' (L&R) ke kelompok HTM atau AFS. <p>b. Penerapan <i>tainting rule</i> (par.08), dimana entitas masih diperbolehkan untuk</p>	<p>Hanya memberikan dua aturan tambahan sebagai bentuk penyempurnaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reklasifikasi dari kelompok 'diukur pada nilai wajar melalui laba rugi' ke kelompok 'pinjaman yang diberikan dan piutang' (par.55). b. Reklasifikasi dari kelompok 'tersedia untuk dijual' ke kelompok 'pinjaman yang diberikan dan piutang' (par.56). 	<p>Terdapat peningkatan kualitas laba setelah mengadopsi IAS 39. Ini dikarenakan adanya larangan dan batasan bagi manajer untuk melakukan reklasifikasi instrumen keuangan tertentu.</p>

		<p>Reklasifikasi dari kelompok 'tersedia untuk dijual' (AFS) ke 'dimiliki hingga jatuh tempo', pada saat tanggal reklasifikasi laba (rugi) yang belum direalisasi yang sebelumnya telah diakui sebagai ekuitas harus diamortisasi secara periodik dalam sisa masa manfaat sekuritas berdasarkan metode yang sama dengan metode amortisasi premi (diskonto) yang digunakan.</p>	<p>melakukan reklasifikasi dari HTM ke AFS dengan kondisi tertentu, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali. 2. Setelah entitas telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau entitas telah memperoleh pelunasan dipercepat. 3. Terkait dengan kejadian diluar kendali entitas. <p>Selain itu, entitas tidak boleh mengkasifikasikan aset keuangan sebagai HTM, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi kelompok HTM ke AFS dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo.</p>	
2.	<p>Pengakuan <i>opsi</i> konversi yang melekat pada saat penerbitan instrumen</p>	<p>a. Liabilitas b. Dipisahkan antara ekuitas dan liabilitas</p> <p>PSAK 50 (1998) masih memberikan pilihan kepada</p>	<p>Harus dipisahkan antara ekuitas dan liabilitas (PSAK 55 (2011) PA 42).</p> <p>PSAK 55 (2011) PA 42 mewajibkan entitas untuk menyajikan <i>opsi</i> konversi secara terpisah antara kelompok ekuitas dan liabilitas.</p>	<p>Untuk mengurangi tingkat manajemen laba, maka manajer diharuskan untuk memisahkan <i>opsi</i> dan instrumen induknya, dan kemudian diakui</p>

	majemuk	entitas dalam menyajikan <i>opsi</i> konversi sebagai kelompok liabilitas saja atau dipisahkan antara ekuitas dan liabilitas.		sebagai ekuitas dan liabilitas. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas laba.
3.	Pengakuan pada saat instrumen majemuk dikonversi menjadi saham biasa	<p>PSAK 50 (1998) par.19 memberikan pilihan kepada manajer dalam menentukan metode yang akan digunakan dalam mencatat saham yang diterbitkan pada saat terjadinya konversi.</p> <p>Metode yang dapat digunakan untuk mencatat saham yang diterbitkan pada saat konversi:</p> <p>a. Metode nilai buku. Memperlakukan transaksi konversi obligasi menjadi saham biasa sebagai transaksi modal, sehingga tidak ada laba atau rugi yang harus diakui.</p> <p>b. Metode nilai pasar. Memperlakukan transaksi konversi obligasi menjadi saham biasa sebagai transaksi pelunasan hutang obligasi sebelum jatuh tempo, sehingga laba rugi yang terjadi harus diakui.</p>	PSAK 55 (2011) PA 43 (g) membatasi manajer dalam memilih metode pengakuan pada saat <i>opsi</i> dikonversi menjadi saham biasa. Sehingga manajer hanya diperbolehkan menggunakan metode nilai buku.	PSAK 55 (2011) bertujuan menyederhanakan aturan dalam pengakuan saham biasa dengan metode nilai buku, merupakan upaya untuk mengurangi praktik manajemen laba. Sehingga dapat meningkatkan kualitas laba.

4.	Pengakuan pada saat konversi yang dipengaruhi oleh insentif atas instrumen majemuk	PSAK 50 (1998) tidak mengatur tentang pengakuan atas <i>opsi</i> yang dikonversi akibat pengaruh insentif.	PSAK 55 (2011) par.10 mengatur tentang pengakuan atas konversi <i>opsi</i> yang dipengaruhi oleh insentif (yang kemudian diatur lebih rinci dalam PSAK 50 (2010) par.32-33)	Terdapat peningkatan kualitas laba setelah mengadopsi IAS 39. Dikarenakan setelah adopsi IAS 39, entitas diwajibkan untuk mengakui insentif sebagai beban kerugian konversi yang diakui dalam laporan laba rugi. Dengan demikian praktik manajemen laba dapat dikurangi.
5.	Penurunan Nilai (<i>Impairment</i>)	<p>Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dibentuk berdasarkan ekspektasi kerugian kredit (<i>expectation loss</i>) dan biaya perolehan yang baru tidak boleh diubah kembali. (PSAK 50 (1998) par.18)</p> <p>PSAK 50 (1998) tidak mengatur pemulihan pada penurunan nilai sehingga kenaikan atau penurunan atas nilai wajar dicatat dalam neraca secara terpisah sebagai komponen ekuitas.</p>	<p>PSAK 55 (2011) kemudian mewajibkan pemulihan atas penurunan nilai. Hal ini berlaku ketika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui harus dipulihkan kembali dan jumlah pemulihan aset keuangan tersebut diakui pada laporan laba rugi (par. 65-72).</p> <p>Adopsi IAS 39 berdampak pada pembatasan pilihan manajer dalam pembentukan CKPN, dimana pembentukan CKPN harus didasarkan pada bukti-bukti objektif, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan keuangan signifikan • Pelanggaran kontrak • Restrukturisasi • Pinjaman dinyatakan pailit • Hilangnya pasar aktif • Adanya kemungkinan bangkrut 	Setelah mengadopsi IAS 39 pembentukan CKPN harus didasarkan bukti-bukti objektif dan diwajibkannya ada pemulihan atas penurunan nilai. Dengan demikian diharapkan tingkat manajemen laba yang memanfaatkan celah pembentukan CKPN berkurang. Sehingga kualitas laba meningkat.

2.2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji dampak penerapan *International Accounting Standard* (IAS) terhadap kualitas pelaporan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Chen dkk. (2009) dalam jurnalnya yang berjudul “*International Financial Reporting Standards and Accounting Quality : Evidence form the European Union*”, membandingkan kualitas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan di 15 negara anggota Uni Eropa, sebelum dan sesudah adanya adopsi penuh IFRS. Penelitian yang dilakukan oleh Chen dkk. (2009) menggunakan lima indikator dalam mengukur kualitas laporan keuangan yaitu: (a) *earning smoothing*, (b) *managing earning toward targets*, (c) *magnitude of absolute discretionary accruals*, (d) kualitas akrual, dan (e) ketepatan waktu dalam pengakuan kerugian (*timely loss recognition*). Pengukuran *magnitude of absolute discretionary accruals* diestimasi dengan menggunakan delapan jenis model yang berbeda, diantaranya adalah Jones Model dan Lagged Model. Hasilnya, sebagian besar dari kelima indikator tersebut (*managing earning toward target*, *magnitude of absolute discretionary accruals*, dan kualitas akrual) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan meningkat pada periode setelah adopsi IFRS (2005-2007) dibandingkan dengan sebelum adopsi (2000-2004). Meskipun telah mengadopsi IFRS, Chen dkk. (2009) juga menyebutkan bahwa praktik manajemen laba dalam laporan keuangan masih tetap ada. Hal ini terbukti pada meningkatnya indikator *earning smoothing* dan *timely loss recognition* setelah mengadopsi IFRS.

Penelitian yang dilakukan oleh Barth dkk. (2006) dalam jurnal berjudul “*International Accounting Standards and Accounting Quality*”, melakukan pengujian terhadap pengaruh penerapan *International Accounting Standards* (IAS) terhadap kualitas laba dan diproksikan dengan manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Barth dkk. (2006) ini membandingkan sejumlah perusahaan yang menerapkan *International Accounting Standards* (IAS) dengan perusahaan yang belum menerapkan IAS terkait dengan tingginya kualitas laba akuntansi dan biaya modal yang rendah pada 319 perusahaan di beberapa negara. Hasilnya, perusahaan yang menerapkan IAS terbukti memiliki tingkat manajemen laba yang rendah, lebih tepat waktu dalam mengakui kerugian (*more timely loss recognition*), dan lebih relevan dibandingkan dengan perusahaan yang belum menerapkan IFRS atau masih menerapkan GAAP lokal. Penelitian yang dilakukan oleh Barth dkk. (2006) didukung oleh penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Zhou dkk. (2009) yang membuktikan bahwa perusahaan yang mengadopsi IAS menunjukkan pengurangan pada *income smoothing*.

Paulo dkk. (2013) dalam “*The Impact of The Adoption of International Financial Reporting Standards on The Quality of Accounting Information of The Brazilian and European Public Firm*” juga meneliti dampak adopsi IFRS terhadap kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan pada perusahaan publik di Brazil dan Eropa, pada periode tahun 2000 dan 2011. Pada penelitian tersebut Paulo dkk. (2013) melakukan penelitian pada sejumlah perusahaan publik yang terdaftar pada BM&FBovespa dan Bursa Saham di Eropa (Frankfurt, Madrid,

Paris, dan London) pada periode 2000-2011. Penelitian ini menggunakan empat model empiris, seperti *persistence*, *conservatism*, *earnings management* dan kesalahan akrual (*accruals errors*). Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Paulo dkk. (2013) menunjukkan bahwa kualitas informasi akuntansi belum meningkat secara signifikan dibandingkan periode sebelum dan sesudah penerapan IFRS di Brazil ataupun Eropa.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Daniel dkk. (2012) di 15 negara Uni Eropa dalam “*The Effect of Mandatory Adoption of IFRS on Earnings Quality: Evidence from the European Union*” membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah mengadopsi IFRS. Tidak adanya perbedaan yang signifikan ini dikarenakan terdapat beberapa negara Uni Eropa yang baru menerapkan IFRS dan beberapa negara hanya mengadopsi sebagian saja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Daniel dkk. (2012), manajemen laba diproksikan dengan *earnings smoothing*, *managing toward small positive earnings*, kualitas akrual, dan *magnitude of absolute discretionary accruals*. Selain itu untuk menghitung kualitas laba Daniel dkk. (2012) menggunakan beberapa variabel control, seperti ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan, *managerial ownership*, tipe auditor, *as well as industry and country fixed effects*.

Di Indonesia penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Anggraita (2012) dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) Terhadap Manajemen Laba Di Perbankan: Penerapan Mekanisme Corporate

Governance, Struktur Kepemilikan, dan Kualitas Audit”. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraita (2012) menggunakan sampel 36 Bank di Indonesia dari tahun 2009 sampai 2010. Hasil pengujian menemukan terjadinya penurunan praktik manajemen laba di perbankan setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006). Anggraita (2012) menjelaskan bahwa penurunan manajemen laba disebabkan karena PSAK setelah adopsi standar akuntansi internasional mewajibkan entitas untuk menggunakan sumber data yang objektif dalam pembentukan CKPN. Namun penerapan PSAK 50/55 (2012) tidak berpengaruh signifikan pada corporate governance dan perusahaan yang dikendalikan keluarga. Anggraita (2012) juga menyimpulkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh pihak asing dan kualitas audit yang diukur dengan proksi auditor spesialis menunjukkan terjadinya penurunan manajemen laba.

Penelitian tentang perbedaan kualitas laba antara sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 pada perbankan di Indonesia juga pernah dilakukan oleh Handoyo (2011), Saputra (2013) dan Santy dkk (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Handoyo (2011), Saputra (2013), dan Santy dkk (2014) menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas laba signifikan antara sebelum dan sesudah adopsi IAS 39. Santy dkk (2014) berpendapat bahwa standar akuntansi internasional belum sepenuhnya sesuai apabila diimplementasikan di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan karena IASB memiliki anggota yang sebagian besar adalah negara maju. Ketidaksesuaian inilah yang menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dari adopsi standar ini, sehingga tidak

terdapat perbedaan kualitas laba yang signifikan antara sebelum dan sesudah adopsi standar akuntansi internasional.

Tabel 2.4

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Chen dkk. (2009)	Penelitian dengan menggunakan 5 indikator dalam mengukur kualitas laporan keuangan yaitu pemerataan laba (<i>income smoothing</i>), manajemen laba, diskresi akrual, kualitas akrual, dan ketepatan waktu pengakuan kerugian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan meningkat pada periode sesudah adopsi IFRS dibandingkan periode sebelum adopsi.
2.	Barth dkk. (2006)	Sesudah adopsi IAS, manajemen laba berkurang, pengakuan rugi yang lebih tepat waktu, dan peningkatan relevansi nilai dibandingkan yang tidak mengadopsi.
3.	Zhou dkk. (2009)	Perusahaan yang mengadopsi IAS mengalami penurunan dalam <i>earning smoothing</i> .
4.	Daniel dkk. (2012)	Manajemen laba diproksikan dengan <i>earnings smoothing</i> , <i>managing toward small positive earnings</i> , kualitas akrual, dan <i>magnitude of absolute discretionary accruals</i> . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah adopsi IFRS.
5.	Paulo dkk. (2013)	Kualitas informasi akuntansi belum meningkat secara signifikan dibandingkan periode sebelum dan sesudah penerapan IFRS di Brazil dan Eropa.

No.	Peneliti	Hasil Penelitian
6.	Anggraita (2012)	Hasil pengujian menemukan bahwa terdapat penurunan praktik manajemen laba setelah menerapkan PSAK 50/55 (revisi 2006) pada perusahaan perbankan di Indonesia. Namun penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) tidak berpengaruh positif pada corporate governance dan perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga.
7.	Handoyo (2011)	Tidak ada perbedaan kualitas laba antara sebelum dan sesudah adopsi IAS 32 dan 39 pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
8.	Saputra (2013)	Tidak ada perbedaan kualitas laba yang signifikan antara sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 (2005) menjadi PSAK 55 (2006) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
9.	Santy dkk (2014)	Tidak terdapat perbedaan tingkat manajemen laba yang signifikan antara sebelum dan sesudah adopsi IFRS.

2.2.3 Hipotesis

Perbankan merupakan sektor yang cukup rentan terjadi manajemen laba, meskipun memiliki regulasi yang ketat dibandingkan sektor lainnya (Anggraita, 2012). Laporan keuangan adalah salah satu sarana yang dapat digunakan oleh pihak – pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajer. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi manajemen laba ialah dengan melakukan perbaikan terhadap standar akuntansi. Perbaikan dapat dilakukan dengan mengadopsi standar akuntansi internasional. Cai dkk (2008) dalam Santy dkk (2014) mengemukakan bahwa adopsi standar

akuntansi internasional bertujuan untuk menyederhanakan berbagai alternatif akuntansi. Pembatasan ini dilakukan guna membatasi kebijakan manajemen dalam mengatur laba dan meningkatkan kualitas laba dalam laporan keuangan.

Laba yang berkualitas adalah laba akuntansi yang mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya dengan sedikit atau tidak dipengaruhi oleh manajemen laba yang disebabkan dari penerapan konsep akrual dalam akuntansi (Grahita (2001) dalam Sugiarto dan Jang (2007)). Semakin tinggi tingkat manajemen laba dalam laporan keuangan, maka kualitas laba tersebut akan semakin rendah. Dalam kerangka konseptual PSAK, laba dikatakan berkualitas apabila relevan, dapat dipahami, dapat diuji kebenarannya, netral, tepat waktu, dapat dibandingkan, dan lengkap. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kualitas laba dalam laporan keuangan Dewan Standar Akuntansi Keuangan melakukan adopsi standar akuntansi internasional dan salah satunya ialah IAS 39 yang kemudian menjadi PSAK 55 (revisi 2011).

Adopsi IAS 39 menjadi PSAK 55 (2011) memberikan perubahan dalam peraturan tentang instrumen keuangan. Dampak dari adopsi IAS 39 menjadi PSAK 55 (2011) ialah munculnya perbedaan aturan tentang instrumen keuangan antara sebelum dan sesudah adopsi yang kemudian berpengaruh pada perbedaan kualitas laba. Secara garis besar adopsi IAS 39 menjadi PSAK 55 (2011) bertujuan untuk menyederhanakan peraturan dan membatasi manajer dalam menentukan kebijakan mengelola laba. Oleh karena itu dengan mengadopsi IAS 39 menjadi PSAK 55 (2011) diharapkan mampu meningkatkan kualitas laba dan

mengurangi praktik manajemen laba. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Penerapan PSAK 55 (2011) membatasi manajemen dalam melakukan manajemen laba melalui komponen akrual. PSAK 55 (2011) sudah tidak memperkenankan entitas untuk melakukan reklasifikasi instrumen keuangan dari kelompok 'diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi' (FVTPL) ke 'tersedia untuk dijual' (AFS) atau sebaliknya, dari kelompok FVTPL ke 'dimiliki hingga jatuh tempo' (HTM) atau sebaliknya. Namun PSAK 55 (2011) memperkenankan entitas untuk melakukan reklasifikasi dari kelompok FVTPL ke kelompok 'pinjaman yang diberikan dan piutang' (L&R) dan dari kelompok investasi AFS ke kelompok L&R (par.55 dan 56). Meskipun entitas diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi dari FVTPL ke kelompok L&R dan dari AFS ke kelompok L&R, entitas tetap diberikan batasan pada saat reklasifikasi sehingga kesempatan manajer untuk melakukan manajemen laba berkurang. Selain itu PSAK 50 (2011) juga menerapkan *tainting rule* (par.08), dimana entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai HTM, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi kelompok HTM ke AFS dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang signifikan sebelum jatuh tempo. *Tainting rule* masih memperbolehkan entitas untuk melakukan reklasifikasi dari HTM ke AFS dengan kondisi tertentu.

Selain mengatur tentang reklasifikasi, PSAK 55 (2011) juga mengatur tentang pengakuan atas instrumen derivatif melekat atau instrumen majemuk. Pengaruh dari penerapan IAS 39 pada instrumen derivatif lebih bersifat pada penyederhanaan aturan dalam pengakuan dan pengukuran *opsi*. Pada saat instrumen majemuk diterbitkan PSAK 55 (2011) mewajibkan untuk memisahkan *opsi* dari instrumen induk dan mengakuinya secara terpisah (PA 42). Pada saat *opsi* dikonversi menjadi saham biasa, PSAK 55 (2011) membatasi metode yang digunakan untuk mengukur saham biasa. Sehingga metode yang dapat digunakan hanyalah metode nilai buku. Selain itu, PSAK 55 (2011) juga mengatur tentang pengakuan atas insentif dalam bentuk saham biasa tambahan. Ketika *opsi* dikonversi karena dipengaruhi oleh insentif maka saham biasa tambahan yang diberikan langsung diakui sebagai beban kerugian konversi dalam laporan laba rugi (par.10). Dengan penyederhanaan alternatif ini diharapkan celah untuk melakukan manajemen laba dapat dikurangi.

Adopsi IAS 39 menjadi PSAK 55 (2011) juga berdampak pada pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). PSAK 55 (2011) mengatur lebih ketat dan objektif dalam pembentukan CKPN dibandingkan sebelum adopsi. Pembatasan ini dilakukan guna mengurangi tingkat manajemen laba mengingat bahwa CKPN merupakan komponen akrual yang rentan terhadap manajemen laba. Apabila pada periode setelah pembentukan CKPN, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, maka kerugian penurunan yang sebelumnya telah

diakui harus dipulihkan kembali dan jumlah pemulihan diakui dalam laporan laba rugi. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Anggraita (2012), penurunan praktik manajemen laba setelah penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) disebabkan karena berdasarkan PSAK yang telah mengadopsi standar akuntansi internasional, perhitungan CKPN harus berdasarkan data yang bersumber dari data-data transaksi minimal tiga tahun atau lima tahun sebelumnya dan didasarkan pada bukti-bukti objektif sehingga sulit bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Penelitian lain yang dilakukan Barth dkk. (2006); Chen dkk. (2009); Zhou dkk. (2009); dan Paulo dkk. (2013) menemukan bukti bahwa terdapat peningkatan kualitas laba setelah mengadopsi IFRS/IAS. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1: Kualitas laba meningkat setelah mengadopsi IAS 39.